

Krisis Pendidikan di Palestina Tahun 2022: Telaah Diskursif Peran UNICEF

Idha Ismalia Rohmatika
STAI Ibnu Rusyd
e-mail : idhatika@gmail.com

Abstract

Education is a mean of empowerment for a nation, and the Palestinian nation is no exception. However, since the beginning of colonization in 1948 until today, Palestinian nation has experienced a crisis in education, and the main victims are children. One of the international organizations working to help children victims of conflicts and disasters worldwide is UNICEF (United Nations Children's Fund). In this article, the author analyzes the role of UNICEF in resolving the Palestinian education crisis using a postcolonialism approach, specifically Spivak's subaltern concept. The findings of this research are that UNICEF -as a party that voices subalterns- tends to bring their narratives and interests so that the programs they implement align with these interests. As a result, the educational crisis in Palestine continues to occur along with the ongoing occupation of the nation.

Keywords: *education, occupation, Palestine, post-colonialism, subaltern, UNICEF*

Abstrak

Pendidikan adalah salah satu sarana pemberdayaan bagi sebuah bangsa, tidak terkecuali bangsa Palestina. Akan tetapi, sejak mengalami penjajahan di tahun 1948 hingga hari ini, bangsa Palestina mengalami krisis di bidang pendidikan dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Salah satu organisasi internasional yang bergerak membantu anak-anak yang menjadi korban konflik maupun bencana di seluruh dunia adalah UNICEF (*United Nations Children's Fund*). Dalam artikel ini, penulis menganalisis peran UNICEF dalam penyelesaian krisis pendidikan Palestina dengan menggunakan pendekatan poskolonialisme, khususnya konsep *subaltern* dari Spivak. Temuan riset ini adalah UNICEF sebagai pihak yang menyuarakan kaum subaltern cenderung membawa narasinya dan kepentingannya sendiri sehingga program-program yang diimplementasikannya

sejalan dengan kepentingan tersebut. Akibatnya, krisis pendidikan di Palestina terus terjadi seiring dengan berlangsungnya penjajahan atas bangsa tersebut.

Kata kunci: pendidikan, penjajahan, Palestina, poskolonialisme, subaltern, UNICEF

Pendahuluan

Bangsa Palestina terus mengalami penderitaan sejak didirikannya Israel tahun 1948 yang disertai dengan pengusiran besar-besaran warga Arab Palestina dalam peristiwa Al Nakba, hingga hari ini Ketika Israel menduduki kawasan yang ditetapkan PBB sebagai wilayah untuk negara Palestina, yaitu Jerusalem timur dan Tepi Barat, serta memblokade Gaza. Konflik yang berlangsung di Palestina bisa disebut sebagai konflik yang bersifat permanen dan cukup menyita perhatian masyarakat dunia, khususnya perhatian dari Organisasi Internasional atau PBB (Giting, 2013).

Korban dari penjajahan Israel mencakup anak-anak yang jumlahnya 45% dari total populasi Palestina tahun 2020 (UNICEF, 2022a). Mereka kerap kali menjadi korban serangan Israel. Antara lain, disebutkan dalam laporan PBB bahwa dalam 6 bulan pertama di tahun 2022 sebanyak 20 siswa sekolah tewas dan terjadi 115 pelanggaran Israel yang terkait pendidikan di wilayah Tepi Barat (Jaramaya, 2022a). Kondisi terjajah juga berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka terima. Dalam hal ini, UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang merupakan salah satu organisasi internasional di bawah PBB yang diamanati oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperluas kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. (UNICEF, 2022b).

Namun demikian, penyelesaian atas krisis pendidikan di Palestina belum menunjukkan hasilnya. Bagi masyarakat Palestina, pendidikan sangat dihargai di kalangan keluarga di seluruh distrik atau provinsi. Salah satu permasalahan paling krusial dan masih menghambat kemajuan dunia pendidikan di Palestina adalah masalah penyerangan atau ancaman penyerangan terhadap sekolah-sekolah di Gaza dan Tepi Barat yang masih dialami hingga tahun 2022. Hadirnya militer Israel yang memantau atau mengawasi area sekolah, hingga melakukan upaya blokade terhadap sekolah-sekolah di Palestina, telah menyebabkan peningkatan krisis pendidikan di kawasan tersebut (Bonyan Organization, 2022).

Pada bulan September dan Oktober 2022, ribuan orang tua dan remaja di Palestina menggelar aksi protes secara massif di wilayah Yerusalem. Aksi protes tersebut digelar sebagai bentuk perlawanan dan penolakan terhadap Kementerian Pendidikan Israel yang memaksakan kurikulum pendidikan bagi mereka yang

dikhawatirkan dapat mengancam pudarnya identitas anak-anak Palestina di masa depan (Jaramaya, 2022).

Berdasarkan tulisan yang pernah diunggah di akun twitter Menteri Pendidikan Israel Yifat Shasha-Biton, langkah Kementerian Israel itu diambil karena pihaknya menengarai bahwa sekolah-sekolah di Yerusalem memiliki sentimen negatif terhadap tentara Israel, dan para siswa memiliki stigma bahwa militer Israel adalah predator atau pembunuh. Ditambahkan bahwa sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem “sangat mengagung-agungkan para teroris yang mengancam keselamatan Israel.” Yifat menekankan kepada orang-orang Palestina bahwa mereka harus segera memperbaiki konten pada buku-buku teks di sekolah-sekolah Yerusalem berdasarkan kurikulum baru yang dibuat oleh Pemerintah Israel (Jaramaya, 2022). Dalam perspektif Israel, perlawanan dari pihak Palestina adalah “terorisme” sedangkan dalam perspektif Palestina, kemerdekaan dari penjajahan adalah hak mereka.

Sebagai Organisasi Internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan, sesungguhnya UNICEF memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap perlindungan anak-anak di Palestina, khususnya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sebagai contoh, UNICEF telah membantu menyediakan sarana pelindung untuk anak-anak yang berisiko atau terancam dari bahaya perang, khususnya di daerah Gaza, agar mereka merasa aman ketika pergi dan pulang dari sekolah (UNICEF, 2022b). Tak hanya itu, UNICEF juga memiliki program-program unggulan lainnya yang dicanangkan sebagai solusi terhadap masalah-masalah pendidikan yang dialami oleh anak-anak di Palestina.

Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dengan menyoroti bagaimana krisis pendidikan yang dialami semakin kompleks bahkan mengancam pudarnya identitas atau budaya anak-anak di Palestina tahun 2022, penulis menemukan bahwa peran dan sikap UNICEF terhadap perlindungan anak-anak di Palestina belum berhasil memberikan solusi secara final. Penyebabnya adalah karena penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap dunia pendidikan Palestina masih terus berlanjut. Akibatnya, pertempuran antara kelompok perlawanan Palestina dengan Zionis Israel terus berlangsung. Bentrokan senjata antara keduanya pada bulan Agustus 2022 telah menciptakan kerusakan pada bangunan-bangunan sekolah Palestina. Akibatnya, banyak anak-anak di Palestina yang tidak bisa belajar atau bersekolah lagi hingga saat ini (Adhi, 2022).

Berangkat dari hal di atas, penulis akan melakukan analisis atas krisis pendidikan yang dialami oleh anak-anak Palestina, baik secara fisik (akses atau sarana belajar) dan yang lebih penting lagi secara nonfisik (identitas atau budaya) di tahun 2022 serta

bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi krisis ini. Ada beberapa riset terdahulu mengenai UNICEF, antara lain mengenai peran UNICEF dalam perlindungan anak-anak Palestina dan progam *humanitarian actions* di Palestina, yang ditulis Setiawati (2016), Laesalangi (2013), Ramadhaniyah (2016), dan Wardania & Utomo (2021). Namun sejauh ini belum ada yang mengkritisi peran UNICEF dalam menyelesaikan krisis pendidikan di Palestina dengan perspektif poskolonialisme. Untuk itu, penulis melakukan kajian lebih dalam terkait isu ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan data dari studi pustaka dan pemberitaan media massa. Penulis memakai pendekatan poskolonialisme dengan pisau analisis konsep *subaltern* dari Gayatri Spivak.

Poskolonialisme dalam Perspektif Gayatri Spivak

Gayatri Chakravorty Spivak adalah pemikir terkemuka dalam kajian poskolonialisme. Ia seorang ilmuwan yang lahir di India pada tahun 1942. Ia meraih gelar Ph.D dari Cornell University pada tahun 1967 dan menjadi profesor dalam studi bahasa dan sastra Inggris di Universitas Iowa. Pemikiran Spivak banyak mengkritisi karya-karya poskolonial, salah satunya dituangkan dalam esai yang sangat berpengaruh dalam kajian poskolonialisme, berjudul "Can the Subaltern Speak?"

Subaltern adalah istilah yang secara umum bermakna 'kelas tertindas'. Istilah tersebut, dalam pemikiran Spivak, "merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses. Ia menjadi semacam ruang pembedaan," (Setiawan, 2018). Spivak menjelaskan bahwa sebagian pihak, antara lain para akademisi, berusaha menyuarakan suara-suara kaum *subaltern*, namun di saat yang sama, mereka justru melakukan kontrol atas suara-suara tersebut dan "menciptakan representasi stereotip dari berbagai identitas" kaum *subaltern*, sehingga yang terjadi adalah proses "manipulasi yang akan dimanfaatkan oleh kelompok yang mewakili kaum subaltern tersebut" (Setiawan, 2018).

Kelompok yang mewakili atau menyuarakan kaum *subaltern* itu terlihat berupaya menyampaikan ulang apa yang dipikirkan oleh kaum *subaltern*, namun, yang terjadi sebenarnya adalah upaya pemanfaatan kaum *subaltern* bagi kepentingan mereka. Dalam pandangan Spivak, "masalah subaltern bukan hanya mengenai kategori orang yang tertindas atau kelas pekerja yang tertindas, melainkan juga mengenai siapa saja yang suaranya terbatas oleh suatu akses yang mewakilinya" (Yunairi, 2020) sehingga kehadiran mereka menunjukkan adanya praktik kelas yang didominasi.

Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan krisis pendidikan di Palestina dengan berbagai aspek yang ada pada teori tersebut. Dalam hal ini, konsep *subaltern* merupakan konsep yang tepat sebagai pisau analisis dalam kajian isu pendidikan di

Palestina, yang di dalamnya terdapat suara orang-orang Palestina, khususnya anak-anak dan remaja aspirasi dan keinginannya tak pernah didengar oleh Zionis Israel. Dengan begitu, penting bagi penulis untuk menggali lebih dalam peran dan sikap UNICEF, sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta menangani anak-anak dan remaja di negara berkembang dan negara konflik, seperti di Palestina. Untuk menelusuri fakta dari krisis pendidikan di Palestina tahun 2022, penulis akan mengidentifikasi dua hal pokok pada *subaltern* yang dikemukakan Spivak, yaitu (1) munculnya dugaan dalam pemanfaatan situasi dari suatu kepentingan; (2) akan selalu ada kelompok *subaltern* atau masalah *subaltern* yang diabaikan (Setiawan, 2018).

Dinamika Pendidikan di Palestina

Menurut data dari UNICEF tahun 2022, anak-anak Palestina usia 0-17 tahun adalah 45,2% dari total populasi. Sekitar 40% dari total populasi Palestina adalah pengungsi, yaitu mereka yang diusir dari tanah dan rumah mereka oleh Israel, sehingga harus hidup di kamp-kamp pengungsian. Ini tentu saja kondisi yang tidak ideal bagi tumbuh kembang anak. Namun demikian, 97% anak-anak Palestina tetap mengikuti pendidikan sekolah dasar. Jumlah anak-anak yang bersekolah di SMP menurun jadi 75%. Data tahun 2014, ada 34,5% anak-anak Palestina yang hidup dalam kemiskinan multidimensional. Sebanyak 40% anak-anak muda Palestina (usia 15-24 tahun) menjadi penganggur (UNICEF, 2022a).

Pendidikan adalah bagian dari tak terpisahkan dari cita-cita setiap entitas yang beradab, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik di negara maju maupun di negara berkembang, semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak dalam belajar. Dalam hal ini, sebagai bangsa yang sedang terjajah, sangat penting bagi Palestina untuk mendidik generasi bangsa agar dapat berdaya dan mampu bangkit memerdekakan dirinya. Bagi masyarakat Palestina, pendidikan sangat dihargai dan hal ini terlihat dari data yang dikutip di atas, dimana 97% anak-anak tetap bersekolah meskipun dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi tekanan, misalnya, setelah Intifada Pertama tahun 1987, Israel menutup sekolah-sekolah di Tepi Barat dan Gaza, namun dilawan oleh warga Palestina dengan menyelenggarakan kelas-kelas *underground* (Stophthewall.org, t.t.).

Sejak Israel didirikan tahun 1948 di atas tanah Palestina, Israel telah memberlakukan sistem pendirian yang rasis dan represif terhadap warga Palestina, antara lain dengan mendesain ulang buku-buku sejarah. Di dalam buku tersebut dimuat mitos Zionisme sebagai pemilik "hak inherent" atas tanah Palestina. Selain itu, Israel juga melakukan diskriminasi dalam seleksi masuk mahasiswa. Universitas-universitas di Israel

digunakan untuk riset-riset teknologi yang kemudian digunakan untuk menyerang warga Palestina. Mereka juga mendirikan institusi pendidikan di Tepi Barat, yaitu tanah pendudukan yang oleh PBB ditetapkan sebagai negara Palestina (Stopthewall.org, t.t.).

Zionis Israel mendirikan dinding-dinding pembatas yang bertujuan untuk mengisolasi kota-kota dan desa-desa Palestina di wilayah Tepi Barat. Dinding-dinding pembatas tersebut telah menjadi salah satu alat diskriminasi terhadap pendidikan Palestina, karena pembangunannya diikuti dengan adanya aturan dan perizinan yang sangat ketat sehingga menghalangi warga Palestina untuk mengakses berbagai sarana, termasuk sarana pendidikan. Masyarakat di desa-desa harus dipisahkan dari tanah, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan fasilitas pendidikan mereka. Selain itu, para pelajar juga harus merasa kesulitan tatkala mereka diperiksa di pos pemeriksaan, dan harus memilih untuk belajar di sekolah-sekolah dan universitas yang jaraknya paling dekat dengan rumah mereka (Milawati, 2000).

Menurut Buckland (2005), konflik kekerasan berdarah terhadap orang dan institusi serta akibat-akibatnya yang menghancurkan, adalah contoh dari “kebalikan pembangunan.” Jadi, kekerasan adalah simbol dari mundurnya pembangunan pada suatu negara. Dampak yang paling krusial dari masalah ini adalah sistem pendidikan dan anak-anak yang mendapati pelayanan dengan sistem tersebut. Sampai tahun 2022, dampak ini terus mengalami dinamika yang begitu rumit bagi dunia pendidikan di Palestina, baik dampak yang dirasakan secara fisik (sarana) maupun nonfisik (identitas atau budaya).

Krisis Pendidikan di Palestina Tahun 2022

Tahun 2022, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terjadi banyak konfrontasi antara Palestina dan Israel, dimana Palestina menjadi korban serangan yang masif dari Israel yang memiliki persenjataan yang sangat kuat dan lengkap; dan kelompok-kelompok resistensi Palestina juga melakukan perlawanan meskipun dalam kondisi yang sangat tidak berimbang. Pada tanggal 5-7 Agustus 2022, Israel membombardir Gaza selama 3 hari yang diawali dengan serangan udara yang menewaskan Khaled Mansour, seorang komandan senior kelompok resistensi Palestina, Jihad Islam. Serangan tiga hari Israel ini mengakibatkan 44 warga Gaza tewas, di antaranya 15 anak-anak (Rahmayanti, 2022). Sementara itu di Tepi Barat, Israel juga melakukan berbagai serangan yang mengakibatkan kematian, perampasan rumah dan tanah, termasuk pembongkaran gedung-gedung sekolah, sebagaimana akan dijelaskan lebih detail berikut ini. Secara umum, dampak penjajahan Israel terhadap pendidikan di Palestina dapat dibagi menjadi dua, yaitu krisis fisik dan krisis nonfisik.

A. Krisis Fisik (Sarana dan Akses)

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyatakan bahwa di akhir tahun 2022 ini, ada sekitar 1.385.000 siswa yang memulai tahun ajaran baru di 3.192 sekolah-sekolah Palestina (Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza). Dari jumlah tersebut, 2.333 sekolah milik Otoritas Palestina, 375 sekolah yang dioperasikan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dan 484 sekolah swasta (Minanews, 2022).

Kondisi anak-anak sekolah di Palestina sangat memprihatinkan. Di Gaza, akibat blokade Israel sejak 2007, kondisi ekonomi semakin buruk dan angka kemiskinan terus meningkat. Akibatnya, ribuan anak-anak dan remaja di Jalur Gaza terpaksa putus sekolah. Mereka juga tidak bisa melanjutkan kuliah keluar Gaza akibat blokade (KNRP, 2022). Anak-anak dan remaja di wilayah Tepi Barat juga mengalami halangan saat akan pergi ke sekolah. Salah satu kasus yang dilaporkan media adalah siswa-siswa di kota Tuqu, Betlehem. Menurut Walikota Tuqu, Musa Al-Shaer, cara penghalangan yang dilakukan Israel adalah dengan melarang anak-anak sekolah melewati jalan utama yang lebih dekat karena langsung menuju ke sekolah. Akibatnya anak-anak itu harus melewati jalan lain yang lebih berat untuk dilalui dan membahayakan keselamatan mereka. Tentara Israel dalam menghalangi anak-anak melewati jalan utama bahkan menggunakan tembakan senjata (Wijaya, 2022).

Pihak yang melakukan serangan dan tekanan kepada anak-anak sekolah bukan hanya tentara Israel, melainkan juga para pemukim Israel (yaitu orang-orang sipil Zionis yang tinggal secara ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem timur). Salah satu kasus pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 7 Desember dimana para pemukim ilegal ini menyerang sebuah sekolah menengah di selatan kota Nablus, Tepi Barat. Menurut laporan dari aktivis Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan permukiman di Tepi Barat utara, para pemukim ekstremis yang tinggal di permukiman ilegal Israel di Yitzhar melempari batu ke Sekolah Menengah Wanita Madama. Staf sekolah harus mengevakuasi para siswa demi keselamatan mereka. Tentara Israel yang hadir di lokasi justru melindungi para pemukim dari kemarahan warga, bukannya menghentikan serangan pemukim (Wafa, 2022).

Masalah fisik juga terkait dengan psikologis anak-anak. Anak-anak yang selalu ketakutan akan mengalami dampak psikologis yang berat sehingga kesulitan dalam menjalani pendidikan. Sebagai contoh, dalam serangan militer Israel ke Gaza tahun 2018, banyak anak-anak yang mengalami *shock* dan ketakutan. Mereka juga harus kehilangan rumah dan sekolah. Di antara teman-teman mereka pun ada yang tewas akibat serangan ini. Menurut data, sekitar 59 persen warga Gaza adalah anak-anak.

(Arwin, 2018). Di Tepi Barat, anak-anak juga mengalami masalah terkait psikologis karena harus melewati posko-posko militer saat pulang-pergi sekolah; serta di rumah mereka di kamp pengungsian, mereka harus berdesakan satu rumah dengan banyak orang sehingga sulit bagi mereka untuk belajar dengan tenang (Barghouti, 2018).

UNICEF yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Negara Palestina melaporkan bahwa sekitar satu dari empat anak laki-laki berusia 15 tahun tidak bersekolah. Laporan juga menyebutkan bahwa hampir separuh dari anak yang putus sekolah di bawah 15 tahun adalah remaja laki-laki usia 14 dan 15 tahun. Kualitas pendidikan yang rendah, kekerasan fisik dan emosional di sekolah, dan konflik bersenjata merupakan di antara alasan mereka putus sekolah (Barghouti, 2018).

Menurut laporan PBB, jumlah anak-anak Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang terdampak krisis pendidikan ini lebih dari 1,3 juta anak. Mereka menghadapi peristiwa kekerasan dan pembongkaran sekolah oleh Israel. Dalam 6 bulan pertama di tahun 2022 ada 20 siswa sekolah yang tewas dan ada 115 pelanggaran Israel yang terkait pendidikan di wilayah Tepi Barat. Selain itu, di tahun 2022, Israel memerintahkan agar 56 sekolah dibongkar padahal sekolah-sekolah itu menampung 6400 pelajar di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Di Gaza, gedung sekolah tidak mencukupi sehingga anak-anak harus belajar bergantian dalam dua *shift*. Anak-anak sekolah di Gaza setidaknya mengalami empat perang (serangan Israel ke Gaza) sehingga memunculkan dampak psikologis dan membutuhkan layanan psikososial (Jaramaya, 2022a).

B. Krisis Nonfisik: Perubahan Kurikulum yang Mengancam Identitas Nasional

Krisis pendidikan juga menimpa warga Palestina dalam bentuk intervensi otoritas Israel terhadap kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Palestina yang mengancam identitas budaya Palestina. Dalam situasi konflik, siswa, guru, dan pembuat kebijakan seringkali harus menghadapi masalah tersebut yang langsung menuju ke inti konflik itu sendiri. Mata pelajaran seperti sejarah, geografi, agama, bahasa, sastra bahkan musik menjadi medan pertempuran yang mencerminkan garis-garis konflik di dalamnya dan di luar kelas. Sejarah siapa yang kita ajarkan? Bahasa siapa? Agama siapa? Di sebagian besar negara di dunia, sistem pendidikan sangat mencerminkan yang dominan budaya dan nilai-nilai suatu masyarakat (Murray, 2008).

Otoritas Palestina sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mengatasi krisis pendidikan di Palestina. Kementerian Pendidikan pada Otoritas Palestina telah membuka kurang lebih 20 sekolah baru di seluruh Palestina dan disertai dengan melakukan pemasangan panel surya (listrik dan energi surya) di 120 sekolah, hampir di seluruh wilayah di Palestina. Selain itu, di akhir tahun 2022, Kementerian Pendidikan Palestina juga telah berhasil mendistribusikan 10 juta eksemplar buku pelajaran untuk

semua tingkatan pendidikan (Minanews, 2022). Akan tetapi, berbagai upaya tersebut mendapatkan tantangan yang besar dan lebih memprihatinkan dibandingkan dengan tantangan yang terkait dengan masalah-masalah fisik (Jaramaya, 2022). Otoritas Israel menyampaikan ancaman untuk mencabut izin sekolah untuk anak-anak Palestina dan memaksa para guru atau tenaga pengajar agar mengajar sesuai dengan kurikulum Israel yang menggantikan kurikulum Palestina. Ketika instruksi itu tidak dilaksanakan, Israel menahan dana operasional yang seharusnya diberikan kepada sekolah-sekolah Palestina (Berlianto, 2022).

Otoritas Zionis Israel berusaha keras menyensor teks dari buku-buku ajar Palestina, menghapus halaman-halamannya, dan mengubah teks, khususnya pada topik yang berkaitan dengan sejarah serta geografi Palestina dan Yerusalem. Israel mengatakan bahwa buku pelajaran siswa Palestina berisi konten yang mengandung ujaran kebencian terhadap negara Israel dan pasukan keamanannya. Pada Juli 2022, Israel mencabut lisensi sekolah Al Iman dan lima sekolah lainnya di Palestina (Minanews, 2022).

Yerusalem timur adalah kawasan Palestina yang diduduki oleh Israel, dengan demikian pemerintahan di kota itu dikendalikan oleh Israel. Pemerintah kota telah menginstruksikan perubahan konten buku-buku latihan siswa Palestina. Sebelumnya, di dalam buku-buku tersebut, para murid diminta untuk menuliskan nama orang-orang Palestina yang ditahan di penjara pendudukan Israel, dan mereka ditugaskan agar memberi nama para tahanan itu dengan nama-nama burung sebagai simbol perdamaian. Otoritas Israel memerintahkan penghapusan model tugas-tugas seperti itu. Otoritas Israel juga menginstruksikan penghapusan konten pelajaran tentang artefak Palestina karena tidak diberi label Israel. Lebih jauh lagi, Israel bahkan memerintahkan revisi atas ayat-ayat Al-Quran dalam buku pelajaran Palestina, agar disesuaikan dengan kurikulum Al Kitab (Jaramaya, 2022).

Israel selalu berupaya agar generasi bangsa Palestina tidak melakukan perlawanan terus-menerus terhadap Zionis Israel. Di antara cara yang mereka lakukan adalah dengan mengubah pemikiran pada siswa. Israel berusaha menekan agar sekolah-sekolah Palestina di kawasan yang didudukinya menggunakan kurikulum yang dibuat oleh Israel. Menurut Akademik Palestina untuk Studi Urusan Internasional (2016) yang berbasis di Yerusalem, Israel telah menggunakan insentif keuangan untuk menekan sekolah-sekolah di Yerusalem Timur agar para guru Palestina mengajarkan kurikulum Israel. Saat ini ada sekitar 15 persen dari populasi siswa Yerusalem Timur yang diajarkan kurikulum Israel. Angka ini meningkat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, yaitu hanya 3 persen populasi siswa Yerusalem Timur yang belajar dengan kurikulum Israel (Minanews, 2022).

Perubahan Kurikulum Palestina dan Telaah Diskursif Peran UNICEF

Pascaberdirinya Israel 1948, secara umum sekolah-sekolah Palestina di bawah kontrol Israel. Setelah Perjanjian Oslo dan berdirinya Otoritas Palestina tahun 1994, barulah dimulai penyusunan kurikulum nasional. Penyusunan ini diawali dengan pertanyaan penting: apa yang seharusnya diajarkan? Sebagai salah satu anggota tim pengembangan kurikulum, Dr. Ali Jarbawi, pada tahun 1996 bertanya:

Palestina seperti apa yang kita ajarkan? Apakah itu Palestina bersejarah dengan geografinya yang lengkap, ataukah Palestina yang kemungkinan akan muncul atas dasar kemungkinan kesepakatan dengan Israel? Bagaimana kita memandang Israel? Apa mereka dipandang sebagai tetangga biasa, ataukah negara yang muncul di atas reruntuhan sebagian besar Palestina? (dalam Moughrabe 2001; dikutip dari Murray, 2008)

Segera setelah Otoritas Palestina menerbitkan buku teks pertamanya pada tahun 1998, dapat dilihat bahwa melalui kurikulum itulah mereka melakukan perlawanan, yaitu dengan menjelaskan posisi bangsa Palestina yang sedang diduduki atau dijajah. Akibatnya, pihak Israel mengkritik kurikulum ini, dengan menyebut bahwa buku tersebut menjelek-jelekkan Israel serta mendorong perang dan kekerasan (Murray, 2008).

Setelah membahas dua sub pembahasan tentang krisis pendidikan di Palestina, baik secara fisik (sarana atau akses) dan non fisik (identitas atau budaya), penulis menyimpulkan bahwa rentetan-rentetan masalah yang meliputi krisis pendidikan di Palestina merupakan bagian dari praktek dominasi nyata. Dengan meminjam pisau analisis dari Spivak, ada dua level masalah yang dihadapi kaum *subaltern*, dalam hal ini bangsa Palestina yang dijajah Israel. Pertama, munculnya dugaan dalam pemanfaatan situasi dari suatu kepentingan. Kedua, ada masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum *subaltern* yang diabaikan pemegang kuasa.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pihak Israel berusaha untuk mengintervensi kurikulum Palestina dengan menuduh bahwa kurikulum itu mengajarkan kebencian dan kekerasan kepada Israel. Dalam perspektif bangsa terjajah, sudah tentu ini bukan 'menjelekkan' melainkan menunjukkan fakta sejarah kepada anak-anak Palestina bahwa Israel sejak 1948 melakukan pengusiran dan pembunuhan kepada bangsa Palestina. Anak-anak Palestina yang hari ini lahir dan hidup di pengungsian tentu harus mengetahui sejarah mereka.

Israel dalam memaksakan kepentingannya (yaitu tetap menjajah Palestina) melakukan sangat banyak kejahatan kemanusiaan terkait pendidikan yang dapat disimpulkan ke dalam 11 poin, yaitu (1) masalah ancaman dan penyerangan di sekolah-sekolah Palestina (Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza), (2) masalah bangunan atau infrastruktur yang kurang memadai dan rusak, (3) masalah psikologis anak-anak akibat menyaksikan serangan militer Israel dan hidup berdesakan di kamp pengungsian, (4) masalah anggaran dana yang ditahan oleh Zionis Israel, (5) masalah pengawasan dan pemeriksaan oleh Zionis Israel di pos-pos militer Israel, (6) masalah kurikulum pendidikan Palestina yang diganti dengan kurikulum Israel, (7) masalah kekerasan dan pembunuhan terhadap anak-anak sekolah di Palestina, (8) masalah para guru atau tenaga pengajar yang dipaksa untuk berhenti mengajar jika tidak berkenan mengajar dengan aturan dari Kementerian Pendidikan Israel, (9) masalah kondisi ekonomi keluarga Palestina yang sulit untuk biaya pendidikan, (10) masalah akses jalan yang dibatasi oleh tembok-tembok rasis Israel, dan (11) masalah identitas serta sejarah budaya yang tidak dapat dipelajari lagi oleh generasi bangsa Palestina.

Pada tahun 2022, Israel melakukan kekerasan dengan mencabut izin permanen enam sekolah Palestina di Yerusalem timur (kawasan yang diduduki Israel) dengan alasan bahwa sekolah-sekolah tersebut menggunakan buku pelajaran yang berisi hasutan untuk membenci negara Israel dan tentara Israel. Menteri Pendidikan Israel Shasha Biton mengatakan bahwa sekolah-sekolah itu masih diizinkan selama satu tahun untuk melanjutkan proses belajar-mengajar asalkan mau mengubah kurikulum mereka. Dengan penutupan sekolah-sekolah ini, Israel memaksa anak-anak Palestina untuk pindah ke sekolah-sekolah yang didirikan Israel yang mengajarkan kurikulum Israel (Jundi, 2022).

Kondisi ini memunculkan perlawanan dari warga Palestina. Mereka antara lain melakukan perlawanan melalui media sosial dengan menyebarkan buku teks pelajaran yang dibuat oleh Israel. Di antara kutipan dari buku teks itu berisi klaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan kota itu dibangun dan dikembangkan sejak berdirinya Israel. Pada bagian lain dalam buku teks Israel itu, ada dialog antara tiga anak yang memuji Israel sebagai pihak yang membangun kota-kota Arab, memberikan layanan listrik dan kesehatan, lalu ketiga anak itu menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Pada halaman lain, anak-anak diajari tentang kesucian hari Sabat dalam keyakinan Yahudi (Berlianto, 2022).

Pihak Palestina mewaspadaikan bahwa kurikulum Israel ini dapat menghapus identitas dan sejarah Palestina. Mereka menyadari pentingnya mengajarkan sejarah dan budaya mereka sendiri kepada anak-anak. Meningkatkan tekanan Israel terkait perubahan kurikulum, Kementerian Pendidikan Palestina mengatakan bahwa "Tahun

ini adalah tahun Kedaulatan Pendidikan di Yerusalem.” Ia mengatakan bahwa bangsa Palestina akan terus membela identitas, semangat, dan isi pendidikan Palestina di Yerusalem, melindunginya dari Israelisasi, penghapusan kesadaran dan distorsi fakta sejarah dan geografis (Minanews, 2022).

“Meski penjajah berhasil menaklukkan tanah kami, tapi mereka tidak dapat menaklukkan pikiran kami. Kami membangun di atas tanah, dalam intelektual, dalam institusi, dan dalam diri manusia untuk Palestina yang bebas, sejahtera, mandiri, berdaulat, dan berdampingan dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” demikian disampaikan Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh (Minanews, 2022).

Atas paksaan yang dilakukan Israel untuk mengubah kurikulum itu, sebanyak 98.400 siswa Palestina di Yerusalem yang telah melakukan aksi mogok sekolah selama satu hari di bulan September 2022. Aksi pemogokan ini diinisiasi oleh diserukan oleh komite persatuan orang tua dan didukung oleh semua faksi di Palestina serta organisasi masyarakat sipil (Berlianto, 2022). Seorang wali murid mengatakan dalam aksi protes ini, “Orang-orang Yerusalem berkumpul di sini untuk mengucapkan kata yang jelas: Kami adalah orangtua dari siswa Yerusalem dan orang tua dari generasi berikutnya yang akan membawa, mengikat, dan mempertahankan kota ini. Kami tidak akan membiarkan pikiran anak-anak kami dijinakkan” (Ramandhita, 2022).

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari bangsa Palestina mengenai pentingnya kurikulum dalam membentuk identitas bangsa dan bahwa perubahan kurikulum oleh Israel sangat terkait dengan upaya melanggengkan penjajahan. Namun demikian, tidak mudah untuk melakukan perlawanan ini karena Israel memiliki kekuasaan untuk mencabut izin dan menghentikan bantuan dana kepada sekolah-sekolah yang menolak mengedit buku sekolahnya.

Menurut perkiraan Ketua Persatuan Orang Tua Siswa, Ziad al-Shamali, 42 persen sekolah di Yerusalem akan tunduk pada tekanan Israel karena terancam pemutusan dana. Tuntutan pihak Israel mengenai perubahan adalah tidak boleh ada logo Otoritas Palestina dan bendera Palestina; tidak boleh ada pelajaran yang membahas perjuangan Palestina melawan penjajahan, kesetiaan terhadap tanah air; tidak boleh ada pembahasan mengenai hak para pengungsi untuk kembali ke tempat asal mereka (yang kini dijadikan negara Israel), mengenai permukiman, tahanan, pos pemeriksaan militer, intifada; dan tidak boleh mengajarkan bahwa Zionisme adalah gerakan politik rasis (Jundi, 2022).

Pertanyaan berikutnya adalah: apakah bangsa terjajah (kaum *subaltern*) memiliki hak untuk menyusun kurikulumnya sendiri, yang sudah pasti akan

bertentangan dengan kepentingan pemilik kuasa? Bagaimana peran UNICEF dalam hal ini?

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) adalah salah satu organisasi internasional di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang memiliki visi untuk melakukan peningkatan kualitas hidup terhadap anak-anak maupun wanita yang berada di negara-negara berkembang dan konflik. Sebagai bentuk misinya, UNICEF menyediakan perlindungan layanan kesehatan, pendidikan, vaksinasi, serta dukungan kepada anak-anak yang tinggal di daerah terdampak bencana ataupun daerah tertinggal di seluruh penjuru dunia. Seperti yang diketahui, UNICEF memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Palestina, khususnya dalam bidang pendidikan yang menjadi fokus artikel ini.

Adapun upaya nasional yang didukung dan dicanangkan oleh UNICEF adalah melakukan peningkatan kualitas pendidikan di Palestina yang bersamaan dengan mengembangkan minat dan bakat yang dapat menunjang kebutuhan anak-anak dan remaja agar dapat bekerja dan mengatasi tantangan hidup di masa depan. Di antara program yang dilakukan oleh UNICEF di Palestina adalah mempromosikan keterampilan hidup dan pendidikan kewarganegaraan (*life skills and citizenship education*-LSCE) dan menurut situs resmi UNICEF, LSCE adalah inti dari pekerjaan UNICEF di Palestina (UNICEF, t.t.).

UNICEF juga menciptakan metode pengajaran baru untuk guru sekolah dasar yang dikenal sebagai "objek pembelajaran" yaitu menempatkan anak-anak di pusat pengalaman belajar dan meningkatkan motivasi dan kecakapan hidup mereka melalui partisipasi dalam kelompok dan kegiatan interaktif. Selain itu, UNICEF menerapkan program keterampilan hidup dan kewirausahaan bagi remaja untuk mendukung pekerjaan mereka di masa depan. UNICEF dan mitranya juga menawarkan magang dan konseling karir dengan perusahaan di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur (UNICEF, t.t.).

Khusus terkait dengan pemaksaan kurikulum oleh Israel, sejauh ini UNICEF tidak memberikan komentar. Selain itu, terkait tuduhan 'mengajarkan kekerasan' yang sering dialamatkan kepada sekolah-sekolah Palestina oleh otoritas Israel, UNICEF justru melakukan program 'antikekerasan' yang menekankan pada kondisi domestik. Antara lain, dana yang diberikan UNICEF yang bersumber dari Finlandia dalam program BRAVE (*Building Resilience and Addressing Violence from Early Years through Adolescence*). Dalam proposal program ini, meskipun diakui bahwa ada kekerasan yang dialami anak-anak Palestina akibat penjajahan Israel (meskipun menggunakan istilah yang diperhalus "violence resulting from the occupation and ongoing Israeli-Palestinian conflict", tidak

secara eksplisit menyebut “Israeli occupation” atau penjajahan Israel), namun yang ditekankan untuk diselesaikan melalui program ini adalah kekerasan domestik. Melalui program ini anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan kekerasan (*bullying*) di sekolah, juga mendidik orang tua dan guru agar menyelesaikan “lingkaran kekerasan,” sebagaimana dicantumkan dalam situs UNICEF:

BRAVE adalah program UNICEF yang didanai oleh Pemerintah Finlandia, yang mengatasi lingkaran negatif [kekerasan] ini dengan melatih orang tua, pendidik, dan anak-anak, mengajarkan strategi keterampilan hidup untuk menangani stres, berkomunikasi satu sama lain, dan mengidentifikasi siswa yang sedang berjuang dengan masalah yang luar biasa. tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak (UNICEF, 2023).

Dalam laporan tahunan Kantor UNICEF Palestina tahun 2022, disebutkan bahwa yang dilakukan adalah “mengubah direktorat kurikulum menjadi pusat kurikulum dan pengenalan unit penjaminan mutu pendidikan sekolah dengan mandat untuk mengubah sistem penilaian” (UNICEF, 2022c). Sama sekali tidak disinggung mengenai kekerasan yang dilakukan Israel dalam mengganti kurikulum Palestina

Terkait kekerasan, laporan tahunan tersebut menyebutkan bahwa per 31 Desember 2022 ada 53 anak Palestina dan satu anak Israel tewas “dalam kekerasan terkait konflik” dan 1.049 anak dilaporkan terluka (UNICEF, 2022c). Penggunaan kata “kekerasan terkait konflik” merupakan eufemisme dari kondisi yang sesungguhnya, dimana yang terjadi seringkali adalah tembakan langsung tentara Israel kepada anak-anak Palestina. Dalam periode Januari-November 2022, menurut laporan Save The Children ada 34 anak-anak yang tewas akibat dibunuh tentara Israel maupun pemukim ilegal Zionis. Salah satu kasusnya adalah Mahmoud Abdel-Jalil Al Saadi (usia 17 tahun) tewas ditembak tentara Israel saat ia berjalan menuju sekolah pada 21 November 2022 (Save the Children, 2022).

Laporan ini juga menyebutkan bahwa terjadi penutupan dan pembongkaran sekolah-sekolah dan di antara dampaknya adalah “antara Januari dan September 2022, total 8.381 menit pelajaran hilang karena insiden terkait pendidikan.” UNICEF dalam laporan ini terlihat lebih memfokuskan pada masalah mental anak-anak “akibat rangkaian kekerasan yang berulang” dan menyerukan adanya layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial (UNICEF, 2022c). Ini sejalan dengan program BRAVE yang disebutkan sebelumnya.

Dengan menggunakan konsep *subaltern* dari Spivak, terlihat bahwa meskipun UNICEF menyuarakan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Palestina, namun ada upaya untuk mengarahkan fokus kepada hal-hal di luar akar masalah; misalnya kepada

masalah mental anak; atau kekerasan domestik. Solusi diimplementasikan melalui program-program yang dibiayai oleh negara-negara kaya juga lebih difokuskan pada isu-isu parsial. Ini menunjukkan bahwa pihak yang menyuarakan penderitaan kaum *subaltern* memiliki kepentingan dan narasinya sendiri sehingga tidak menyelesaikan masalah-masalah besar yang dialami kaum *subaltern*.

Penulis berpandangan bahwa UNICEF belum dapat menyelesaikan krisis ini dengan posisi yang adil sebagai organisasi internasional. UNICEF hanya terfokus terhadap Palestina saja namun melupakan peran Israel yang menyebabkan Palestina mengalami krisis. Selain itu, penulis juga belum menemukan upaya kongkrit yang dilakukan oleh UNICEF untuk menghentikan Israel dalam melancarkan hegemoni penjajahan terhadap dunia pendidikan di Palestina. Hegemoni pendidikan merupakan akar dari munculnya krisis, oleh karena itu penting bagi UNICEF sebagai perwakilan dari PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk melakukan advokasi dengan secara langsung meminta Israel agar menghentikan berbagai pelanggaran hukum internasional yang mereka lakukan.

Pejabat dari Kementerian Pendidikan Palestina, Dima al-Samman, bahaya dari kurikulum buatan Israel adalah karena di dalamnya ada pemalsuan sejarah mengenai Palestina dan hal itu akan menghilangkan kesadaran identitas nasional anak-anak Palestina serta menciptakan rasa rendah diri di dalam diri mereka. Konvensi Jenewa yang menjamin hak masyarakat yang berada di bawah pendudukan (penjajahan) untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan keyakinan mereka dan untuk melindungi budaya dan warisan mereka dari perubahan atau distorsi (Jundi, 2022). Atas dasar ini, dapat disimpulkan bahwa bangsa Palestina berhak untuk menyusun kurikulumnya sendiri dan pemaksaan perubahan kurikulum yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran atas hukum internasional. Oleh karena itu seharusnya UNICEF memberikan perhatian serius pada isu ini.

Simpulan

Sejak dimulainya penjajahan Israel di atas tanah Palestina tahun 1948, Palestina telah mengalami krisis multidimensi, di antaranya krisis pendidikan. Artikel ini memfokuskan kajian pada krisis pendidikan di Palestina tahun 2022 dimana terjadi eskalasi pemaksaan perubahan kurikulum Palestina oleh Israel. Penulis menganalisis peran UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dalam penyelesaian krisis ini. Secara umum, UNICEF merupakan organisasi kemanusiaan yang berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan di Palestina, antara lain dengan mengajarkan keterampilan hidup dan pendidikan kewarganegaraan (*life skills and citizenship*

education), mengembangkan minat, bakat, serta keterampilan anak agar mereka mampu belajar, bekerja, dan mengatasi tantangan hidup di masa depan.

Namun demikian, melalui telaah diskursif atas implementasi program-program UNICEF itu terlihat bahwa UNICEF masih mengedepankan narasi dan kepentingannya, dan belum bersikap adil, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan di Palestina secara fundamental. UNICEF hanya terfokus pada masalah di Palestina namun melupakan peran Israel yang telah menyebabkan masalah itu terjadi. UNICEF hanya melakukan dialog dan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Palestina namun tidak melakukan upaya diplomasi dengan Kementerian Pendidikan Israel. Dengan menggunakan konsep subaltern dari Spivak, terlihat bahwa meskipun UNICEF menyuarakan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Palestina, namun ada upaya untuk mengarahkan fokus kepada hal-hal di luar akar masalah; misalnya kepada masalah mental anak; atau kekerasan domestik. Solusi diimplementasikan melalui program-program yang dibiayai oleh negara-negara kaya juga lebih difokuskan pada isu-isu parsial. Ini menunjukkan bahwa pihak yang menyuarakan penderitaan kaum *subaltern* memiliki kepentingan dan narasinya sendiri sehingga tidak menyelesaikan masalah-masalah besar yang dialami kaum *subaltern*.

Daftar Pustaka

- Adhi, I. S. (2022). Anak-Anak Tewas dalam Perang Roket Israel dan Kelompok Jihad Palestina di Gaza. *Kompas*, [online]. Dalam: <https://www.kompas.com/global/read/2022/08/07/164300970/anak-anak-tewas-dalam-perang-roket-israel-dan-kelompok-jihad-palestina-> [Diakses 12 Desember 2022].
- Arwin. (2018). Penegakkan Hukum Perang (Humaniter) pada Masalah Korban Perang (Civilian) Israel-Palestina (Skripsi). [online]. Dalam: <http://repository.unpas.ac.id/35816/5/BAB%20I.pdf> [Diakses 12 Desember 2022].
- Barghouti, A. (2018). Finding a Way to School in the State of Palestine. *UNICEF*, [online]. Dalam: <https://www.unicef.org/stories/finding-way-school-state-palestine> [Diakses 24 Juni 2023]
- Buckland, P. (2005). *Reshaping the Future: Education and Post-Conflict Reconstruction*, Washington, D.C.: The World Bank.
- Berlianto. (2022). Sekolah Palestina Tolak Israelisasi Lewat Kurikulum. *Sindonews*, [online]. Dalam : <https://international.sindonews.com/read/890795/43/sekolah->

- palestina-mogok-tolak-israelisasi-lewat-kurikulum-1663711773/ [Diakses 18 Desember 2022].
- Bonyan Organization. (2022). Education Crisis in Palestine. [Online]. Dalam: <https://bonyan.ngo/education/education-crisis-in-palestine/> [Diakses 12 Desember 2022].
- Giting, E. D. (2013). Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Hukum Internasional, *Jurnal Saintech*. Vol. 05. No.01.
- Jaramaya, R. (2022a). Israel Tutup Sekolah di Ramallah. *Republika*, [online]. Dalam : <https://www.republika.co.id/berita/rhtlod335/israel-ancam-tutup-sekolah-di-ramallah> [Diakses 18 Desember 2022].
- Jaramaya, R. (2022b). Palestina Menentang Upaya Israel Ubah Buku Pelajaran Sekolah. *Republika*, [online]. Dalam: <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rj6mfz382/palestina-menentang-upaya-israel-ubah-buku-pelajaran-sekolah> {Diakses 18 Desember 2022}
- Jundi, A. (2022). Israel revokes permanent licences at six Palestinian schools in Jerusalem. *Middle East Eye*, [online]. Dalam: <https://www.middleeasteye.net/news/israel-withdraws-permanent-licences-palestinian-schools-jerusalem> [Diakses 24 Juni 2023]
- KNRP. (2022). Cerita dari Kehidupan Kampus-Jalur Gaza. *Amalsoleh*, [online]. Dalam: <https://www.amalsholeh.com/bangun-kampus-palestina> [Diakses 18 Desember 2022].
- Laesalangi, D. Z. (2013). *Peacebuilding* Pada Konflik Israel-Palestina (Studi Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Palestina) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Milawati, A. (2000). *Intifada, Gelagak Perlawanan Kaum MudaPalestina*. Yogyakarta: Avyrous.
- Minanews. (2002). Sekitar 1,4 Juta Siswa Palestina Memulai Tahun Ajaran Baru. [Online]. Dalam: <https://minanews.net/sekitar-14-juta-siswa-palestina-mulai-tahun-ajaran-baru/> [Diakses pada 18 Desember 2022].
- Murray, H. (2008). Curriculum wars: National identity in education', *London Review of Education*. Vol. 6, No. 1, 39–45.
- Rahmayanti, Y. (2022). Israel dan Palestina Kembali Memanas, 44 Korban Jiwa di Palestina serta Puluhan Warga Israel Terluka. *Tribun News*, [online]. Dalam: <https://www.tribunnews.com/internasional/2022/08/09/israel-dan-palestina->

kembali-memanas-44-korban-jiwa-di-palestina-serta-puluhan-warga-israel-terluka [Diakses 18 Desember 2022].

Ramadhaniyah, B. N. (2016). Peranan United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik Di Palestina (Skripsi). Universitas Pasundan.

Ramandhita, A. D. (2022). Israel Siapkan Buku Pelajaran yang telah didistorsi, Sekolah Palestina Menolak dengan Aksi Pemogokan. *RMOL*, [online]. Dalam: <https://dunia.rmolid/read/2022/09/19/547925/israel-siapkan-buku-pelajaran-yang-telah-didistorsi-sekolah-palestina-menolak-dengan-lakukan-aksi-pemogokan> [Diakses 18 Desember 2022].

Save the Children. (2022). 2022 becomes the deadliest year for Palestinian children in the West Bank in over 15 years. [online]. Dalam: <https://www.savethechildren.net/news/2022-becomes-deadliest-year-palestinian-children-west-bank-over-15-years-save-children> [Diakses 24 Juni 2023]

Setiawati, Tia. (2016). Dukungan Mitra Kerja Unicef Terhadap Pelaksanaan Program Unicef Dalam Memberikan Bantuan Kepada Anak-Anak Korban Perang Di Palestina (Skripsi). Universitas Pasundan.

Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, Vol. VI No. 1.

Stophthewall.org. (t.t.). Students in Palestine Education under Occupation and Apartheid. [online]. Dalam: https://www.stophthewall.org/downloads/pdf/youth_fs.pdf [Diakses 20 Juni 2023].

UNICEF. (t.t.). Education and adolescents. Dalam: <https://www.unicef.org/sop/what-we-do/education-and-adolescents>

UNICEF. (2022a) The Situation Of Children in the State of Palestine - Country factset September 2022. [online]. Dalam <https://www.unicef.org/sop/reports/situation-children-state-palestine> [Diakses 24 Juni 2023].

UNICEF. (2022b). UNICEF mission statement. [online]. Dalam: <https://www.unicef.org/about-us/mission-statement> [Diakses 24 Juni 2023].

UNICEF. (2022c). Country Office Annual Report 2022. [online]. Dalam: <https://www.unicef.org/media/136531/file/Palestine-State-of-2022-COAR.pdf> [Diakses 20 Juni 2023].

- UNICEF. (2023). BRAVE students and educators break a violent cycle in Palestinian schools. [online]. Dalam: <https://www.unicef.org/sop/stories/brave-students-and-educators-break-violent-cycle-palestinian-schools> [Diakses 24 Juni 2023].
- Wafa. (2022). Israeli settlers attack Palestinian school near Nablus. [online]. Dalam: <https://english.wafa.ps/Pages/Details/132245> [Diakses 24 Juni 2023].
- Wardania, R.V. & Utomo, A. B. (2021). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021. *Global & Policy*, Vol.10, No.1.
- Wijaya, P. (2022). Tentara Israel Hendak Halangi Siswa Ke Sekolah. *Merdeka*, [online]. Dalam: <https://www.merdeka.com/dunia/tentara-israel-halangi-siswa-palestina-hendak-ke-sekolah.html> [Diakses 18 Desember 2022].
- Yunairi, D. (2020). Konsep Feminisme Gayatri Chakravorty Spivak Dan Upaya Membangun Keluarga Unggul (Kajian Feminisme Modern). *Sanjiwani: Jurnal Filsafat* Vol. 11 No. 1.